



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 3/Kep.Pimp./2022

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas 2022-2024, maka perlu ditetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi, dan dilaporkan dalam rapat paripurna serta ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.]

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, leading to more efficient and accurate results.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and up-to-date.

- Memperhatikan : a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5/SB/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Maret 2022 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pimpinan dan susunan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas 2022-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain oleh anggota komisi bersamaan dengan terjadinya perubahan susunan keanggotaan komisi.
- KETIGA** : Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi.
- KEEMPAT** : Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Maret 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua

INDRA DT. RAJOLESILO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and that any discrepancies are identified and corrected promptly.

3. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups.

4. These methods are chosen based on the specific needs of the study and the characteristics of the population being studied.

5. The third part of the document describes the process of data analysis, which involves identifying patterns and trends in the data.

6. This process is often aided by statistical software and can be a complex and time-consuming task.

7. The fourth part of the document discusses the importance of interpreting the results of the analysis and drawing meaningful conclusions.

8. This involves comparing the findings to existing research and theory, and considering the implications of the results for practice.

9. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the study.

10. It also includes a discussion of the limitations of the study and suggestions for future research.

11. The sixth part of the document contains a list of references to the sources used in the study.

12. These references provide a starting point for further exploration of the topics discussed in the document.

13. The seventh part of the document includes a list of appendices, which contain additional information related to the study.

14. These appendices may include raw data, questionnaires, and other documents used during the research process.

15. The eighth part of the document provides a list of contact information for the author and other individuals involved in the study.

16. This information is provided to facilitate communication and collaboration with other researchers in the field.

17. The ninth part of the document includes a list of acknowledgments, which recognize the contributions of individuals and organizations that supported the study.

18. These acknowledgments are an important part of the document and help to build a sense of community and shared purpose among researchers.

19. The tenth part of the document contains a list of footnotes, which provide additional information and references related to the text.

20. These footnotes are used to provide more detail and context for the information presented in the main text.

21. The eleventh part of the document includes a list of tables and figures, which are used to present data and results in a clear and concise manner.

22. These tables and figures are an essential part of the document and help to illustrate the findings of the study.

23. The twelfth part of the document contains a list of appendices, which contain additional information related to the study.

24. These appendices may include raw data, questionnaires, and other documents used during the research process.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 3 / Kep.Pimp/ 2022
 TANGGAL : 7 Maret 2022

PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN

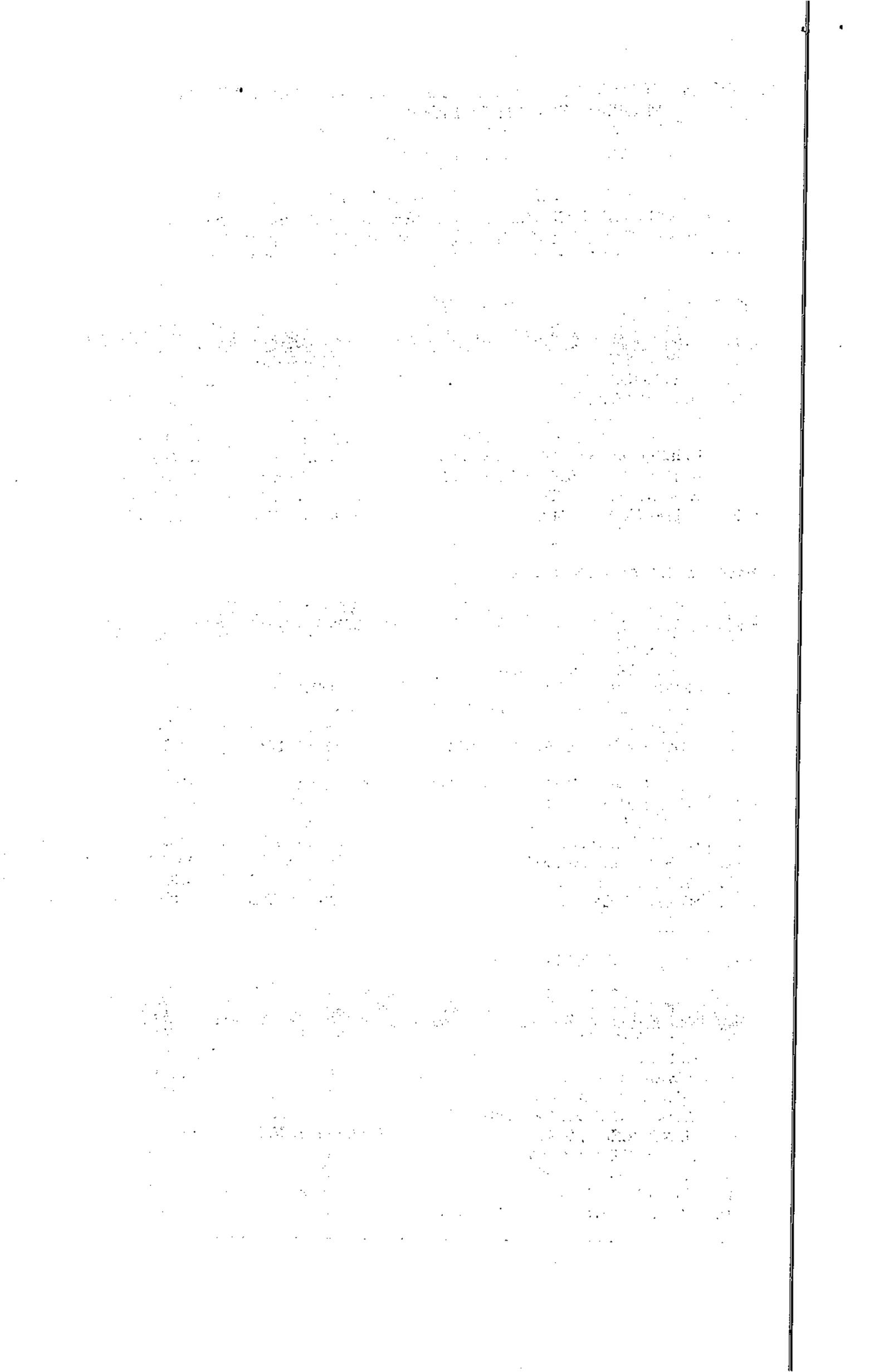
No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SAWAL, SH	F.PPP-NASDEM	KETUA
2.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd.	F.PAN	WAKIL KETUA
3.	H. RAFDINAL, SH	F.PKS	SEKRETARIS
4.	DESRIO PUTRA, ST	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	Hj. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	H. IRZAL ILYAS DT.LAWIK BASA, MM	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM.	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	H.M. SYAFRIL HUDA	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
9.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI II BIDANG EKONOMI

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F.PKS	KETUA
2.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI	F.P. GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	JEFRI MASRUL, SE.	F.P.DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	JEMPOL	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST.MM	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
7.	M.IHPAN	F.PKS	ANGGOTA
8.	Ir. H. ARKADIUS DT.INTAN BANO,MM.MBA.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	MUHAMMAD IKHBAL, SE	F.PAN	ANGGOTA
10.	H. MUZLI M. NUR, S.Pd	F.PAN	ANGGOTA
11.	H. LAZUARDI ERMAN, SH.	F.P.GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. BAKRI BAKAR, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	FIRDAUS, SH.I.	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
14.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI III BIDANG KEUANGAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. ALI TANJUNG, SH	F.P.DEMOKRAT	KETUA
2.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	F.PKS	WAKIL KETUA
3.	IRWAN AFRIADI.	F.PPP-NASDEM	SEKRETARIS
4.	ISMUNANDI SOFYAN SE	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	JASMA JUNI DT. GADANG, SE	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	H. NOFRIZON, S.Sos	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	H. DODY DELVY, SE.	F.PAN	ANGGOTA
8.	H. AHMAD RIUS, SH	F.PAN	ANGGOTA
9.	ZARFI DESON, SH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
10.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA



KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH. M.Si	F.P.GOLKAR	KETUA
2.	H. BUKHARI DT.TUO, SE	F.PAN	WAKIL KETUA
3.	SUHARJONO	F.P.DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	KHAIRUDIN SIMANJUNTAK	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	MESRA	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
7.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F.PKS	ANGGOTA
8.	H. BUDIMAN, S.Ag, MM.	F.PKS	ANGGOTA
9.	H.M. NURNAS, ST	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	Hj. ARTATI, SH.MH	F.PAN	ANGGOTA
11.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIS	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. TAUFIK SYAHRAL, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	RICO ALVIANO RAJO NAN SATI, ST	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI V BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. DASWANTO, SE	F.PAN	KETUA
2.	Hj. AIDA, SH	F.P.DEMOKRAT	WAKIL KETUA
3.	DR. H. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F.P.GOLKAR	SEKRETARIS
4.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA DT. SUNGGUNO, M.Si	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	H. HIDAYAT, SS.MH	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	MARIO SYAH JOHAN	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
7.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP.	F.PKS	ANGGOTA
8.	H. MUHAMMAD RIDWAN, S.IP.	F.PKS	ANGGOTA
9.	H. ISMET AMZIS, SH.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	MUHAYATUL, SE. M.Si.	F.PAN	ANGGOTA
11.	H. AFRIZAL, SH.MH	F.P.GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. DASWIPETRA DT. MANJINJIANG ALAM, SE.M.Si	F. PPP- NASDEM	ANGGOTA
13.	DONIZAR	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



SUPARDI

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua

INDRA DT. RAJOLELO

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author provides a detailed breakdown of the monthly budget. It includes categories for housing, utilities, food, and entertainment. The goal is to identify areas where spending can be reduced without affecting the quality of life.

The third section focuses on investment strategies. It suggests diversifying the portfolio to include both stocks and bonds. The author also mentions the importance of regular contributions to retirement funds, highlighting the power of compound interest over time.

Finally, the document concludes with a summary of key takeaways. It reiterates the need for discipline and consistency in financial planning. The author encourages readers to review their financial status regularly and make adjustments as needed.